



# IMPROVING EC AID

Pelibatan Masyarakat Sipil Indonesia dalam Skema Pendanaan Masyarakat Eropa di Sektor Kehutanan

## APA ITU MASYARAKAT EROPA? APA ITU UNI EROPA?

Masyarakat Eropa (ME) dibentuk berdasarkan Traktat Roma pada tahun 1957 dengan tujuan utama mewujudkan pasar tunggal. Namun demikian, aktivitas lain juga termasuk, di antaranya kerjasama pembangunan antar negara anggota. Pada mulanya, ME hanya terdiri dari 6 negara yaitu Perancis, Belanda, Belgia, Luxemburg, Jerman dan Italia.

Traktat Maastricht 1992 mengenalkan bentuk kerjasama baru diantara negara-negara anggota ME dan membentuk Uni Eropa, yang terdiri dari ME dan menambahkan dua pilar kerja sama lainnya yaitu 1) kerja sama antar negara dalam hal kebijakan luar negeri dan keamanan; 2) kerja sama antar negara dalam hal kehakiman dan urusan dalam negeri.

Saat ini Uni Eropa beranggotakan 25 negara yaitu: Belanda, Belgia, Luxembourg, Perancis, Inggris, Jerman, Swedia, Finlandia, Spanyol, Italia, Denmark, Irlandia, Yunani, Portugal, Austria, Cyprus, Republik Ceko, Hungaria, Latvia, Lituania, Malta, Polandia, Slovakia, Slovenia dan Polandia. Ibukota Uni Eropa berada di Brussels, Belgia.

Uni Eropa memiliki 3 komponen utama:

1. *Council of the European Union*/Dewan Uni Eropa Merupakan badan legislatif dan pembuat keputusan di UE. Terdiri dari perwakilan pemerintah dari negara-negara anggota
2. *European Commission*/Komisi Eropa Merupakan badan eksekutif yang ditunjuk oleh negara-negara anggota. Secara politis bertanggung jawab kepada Parlemen Eropa
3. *European Parliament*/Parlemen Eropa Parlemen Eropa terdiri dari 626 anggota parlemen yang dipilih langsung dan berasal dari negara-negara anggota. Parlemen Eropa bekerja dalam komite-komite untuk mengusulkan dan mengadopsi perubahan-perubahan pada proposal Dewan atau Komisi.

## EUROPEAN COMMUNITY AID /BANTUAN MASYARAKAT EROPA

Peranan *European Community/EC* (Masyarakat Eropa/ME) sebagai donor bantuan diatur melalui *EC Development Policy* (Kebijakan Pembangunan ME) yang diadopsi sejak tahun 2000. Komisi Eropa bertanggung jawab dalam mengatur bantuan ME untuk pembangunan, yang juga dikenal sebagai *EC aid*.

Bantuan ME dibagi dan diatur melalui program regional sesuai dengan tujuan ME di region tertentu yang biasanya tertuang dalam sebuah perjanjian kerjasama dengan negara-negara tertentu. Misalnya perjanjian Cotonou, yang merupakan dasar hukum pemberian bantuan antara ME dengan 77 negara di kawasan Afrika, Karibia dan Pasifik yang menandatangani perjanjian ini.

Program bantuan ini didanai melalui anggaran regional di bawah regulasi yang sesuai. Selain itu berbagai proyek juga didanai melalui anggaran tematis, seperti anggaran hutan, anggaran lingkungan, dsb.

Komisi Eropa telah menyusun *Country Strategy Paper* (CSP) yang menjelaskan secara detail penggunaan dana untuk satu negara atau region tertentu yang menerima bantuan dari ME. CSP ini akan menentukan kerangka kerja prioritas Komisi Eropa. Selain itu juga disusun *National Indicative Program*/Program Indikasi Nasional (NIP) dan juga *Regional Indicative Program*/Program Indikasi Regional (RIP) yang mengindikasikan area fokus (proyek) yang akan didanai.

Komisi Eropa memiliki perwakilan di negara penerima donor yang disebut sebagai **delegasi**. Delegasi berfungsi untuk mengambil alih peran manajemen dana ME dan berperan untuk meningkatkan kualitas dan mempercepat turunnya dana. Selain itu, di Brussels, Belgia setiap negara/region penerima bantuan memiliki *desk officer*

yang berfungsi mengevaluasi apakah proyek-proyek yang tengah berjalan memenuhi pencapaian tujuan proyek tersebut.

### Penyusunan CSP

CSP disusun oleh delegasi KE di negara yang bersangkutan bersama-sama dengan desk officer di Brussels, setelah melewati konsultasi ekstensif dengan pemerintah negara-negara anggota UE, donor bilateral dan multilateral lain serta perwakilan masyarakat madani.

Setelah sebuah CSP disetujui, sebuah agen Komisi Eropa yang bernama Europe Aid bersama dengan delegasi KE di negara bersangkutan menyusun daftar proyek prioritas untuk negara tersebut.

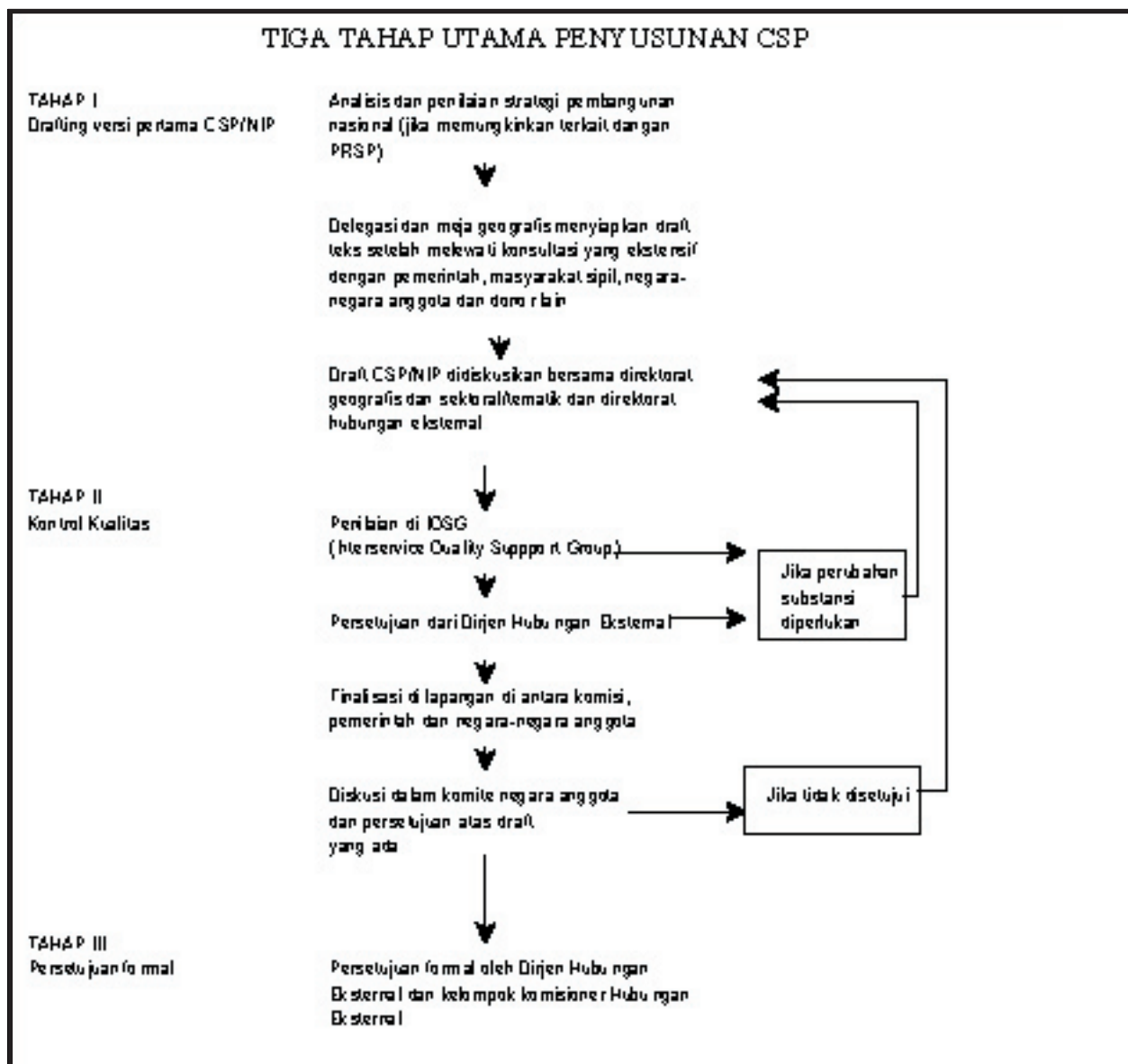
Daftar ini kemudian harus disetujui oleh Direktorat Jendral Hubungan Eksternal (DG Relex). Setelah daftar ini disetujui, maka Europe Aid dan delegasi KE bertanggung jawab untuk penilaian kontrak proyek dan pengelolaannya.

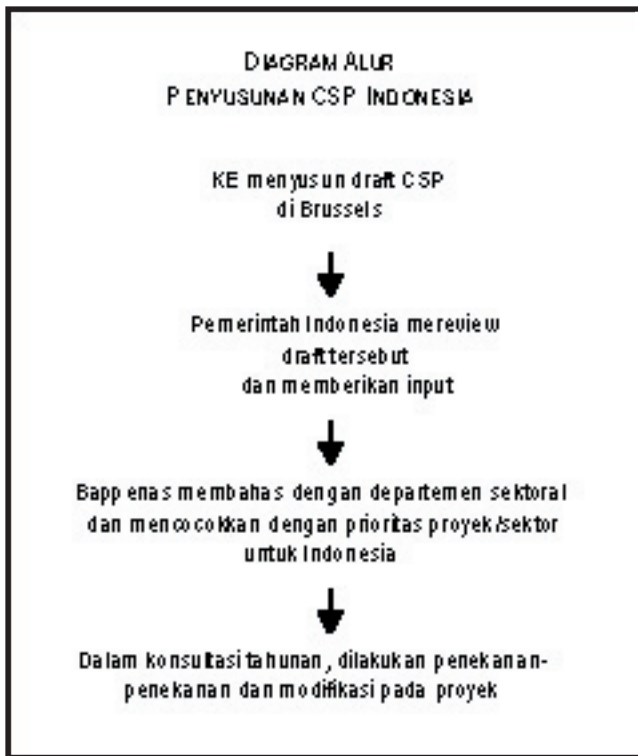
### EC AID DAN INDONESIA

Indonesia merupakan salah satu Negara penerima dana dari ME yang dikeluarkan dari anggaran ALA. Seperti juga negara penerima bantuan lainnya, pemberian dana hibah di Indonesia juga didasarkan pada Country Strategy Paper.

CSP yang berlaku di Indonesia berlaku lima tahun, yaitu 2002-2006. CSP ini dibagi kedalam dua NIP, yaitu NIP 2002-2004, dan NIP 2005-2006. pada pertengahan tahun 2004 diadakan evaluasi tengah tahun untuk CSP dan memulai penyusunan draft NIP periode 2005-2006

Pada NIP 2002-2004, Komisi Eropa berkomitmen untuk mengucurkan dana hibah senilai 144 juta Euro kepada pemerintah Indonesia, yang dialokasikan kepada berbagai sektor, yaitu: *good governance* dan desentralisasi, sumber daya alam, dana *ad-hoc* untuk *good governance* dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta untuk kerjasama perdagangan, ekonomi dan investasi.





Sejumlah 51 juta Euro yang dianggarkan dalam NIP 2002-2004 dialokasikan untuk sector sumber daya lama, termasuk didalamnya sector kehutanan. Bersama dengan dana hibah yang berasal dari CSP sebelumnya, maka Masyarakat Eropa merupakan penyumbang terbesar untuk sector kehutanan Indonesia dengan nilai dana hibah 91 juta Euro.

Sampai dengan May 2003 terdapat 6 proyek berjalan di sector kehutanan yang didanai masyarakat Eropa, yaitu:

1. Leuser Development Project sejumlah 31 juta Euro.
2. South Central Kalimantan Production Forest Project sejumlah 28 juta Euro.
3. South Sumatra Forest Fire management
4. Forest Liaison Bureau sejumlah 5 juta Euro.
5. Berau Forest Bridging Project
6. Illegal Logging Response Center

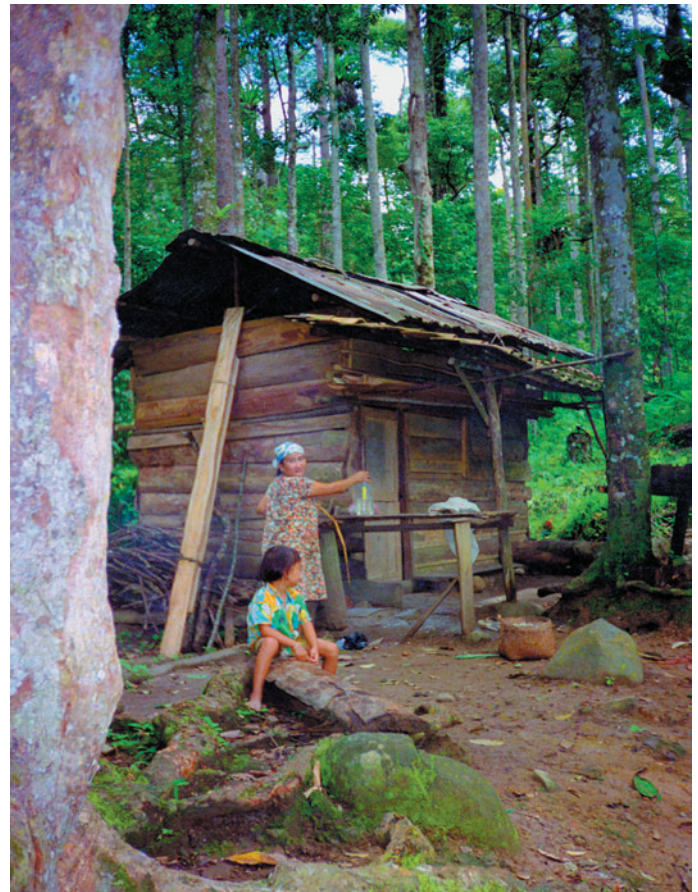
Pada tahun 2002 FERN, sebuah LSM yang berbasis di Brussels, Belgia melakukan review terhadap 16 CSP negara-negara yang mempunyai sumber daya hutan cukup berlimpah. Hasil riset ini menunjukkan bahwa dana ME tidak memberikan kontribusi terhadap konservasi dan pengelolaan hutan secara lestari dan bahkan bisa berdampak pada rusaknya hutan dan memiskinkan masyarakat yang hidup di sekitar hutan.

Dari 16 CSP yang dianalisis, hampir semuanya tidak mengindahkan prinsip dan kebijakan yang berlaku

di Komisi Eropa, misalnya integrasi lingkungan, konsultasi dengan masyarakat sipil dan pengakuan hak masyarakat adat.

Dalam riset yang dilakukan FERN, CSP Indonesia termasuk yang paling baik di antara yang lainnya. Analisis situasi, kondisi dan permasalahan di Indonesia dipandang cukup komprehensif yang juga mengakui beberapa masalah utama di bidang kehutanan misalnya penebangan liar, kelebihan kapasitas industri kehutanan. CSP ini juga menyoroti masalah korupsi dan lemahnya penegakan hukum di Indonesia sebagai salah satu faktor utama sulitnya mengatasi permasalahan di sector kehutanan.

Namun demikian, keterlibatan masyarakat madani dalam penyusunan CSP sampai dengan pelaksanaan proyek-proyek kehutanan sangat minim. Dalam konsultasi yang dilakukan Telapak dengan LSM-LSM dan organisasi masyarakat adat yang berkerja untuk isu hutan terlihat sekali minimnya informasi dan komunikasi antara delegasi KE dan pemerintah Indonesia dengan masyarakat madani. Tidak terdapat mekanisme yang memang dibangun untuk menampung aspirasi dari masyarakat madani, terutama mereka yang hidup di sekitar hutan dan menggantungkan hidupnya dari sumber daya alam ini.



*masyarakat sekitar hutan, menggantungkan hidup dari hutan dan penerima dampak utama dari proyek-proyek kehutanan.*



## EC FOREST PLATFORM INDONESIA

EC Forest Platform merupakan sebuah inisiatif yang menghubungkan masyarakat di negara-negara Selatan dengan Masyarakat Eropa (ME) dalam isu bantuan dana dan hutan, dalam upaya memastikan bahwa bantuan ME di sektor kehutanan berkontribusi pada pengelolaan hutan yang lestari dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

EC Forest Platform bertujuan:

1. Memfasilitasi LSM dan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan untuk menyuarkan permasalahan mereka kepada ME
2. Berdiskusi mengenai kebijakan bantuan ME dan implementasinya terhadap hutan dan masyarakat sekitar hutan
3. Menyediakan informasi kepada pembuat kebijakan di ME mengenai hutan dan masyarakat sekitar hutan.

FERN, sebuah LSM yang berbasis di Brussels, Belgia bertindak sebagai koordinator Forest Platform. Telapak, sebuah LSM yang berbasis di Bogor bertindak sebagai koordinator untuk inisiatif ini di Indonesia.

Secara umum aktivitas Forest Platform di Indonesia adalah:

1. Menyuarkan permasalahan kehutanan Indonesia yang berkaitan dengan program bantuan dari ME kepada perwakilan Komisi Eropa di Jakarta, dan juga kepada Komisi Eropa di Brussels Belgia
2. Menyuarkan aspirasi dan pandangan dari kelompok masyarakat madani di Indonesia mengenai isu penting di bidang kehutanan kepada ME.
3. Memonitor pelaksanaan proyek-proyek kehutanan Komisi Eropa di Indonesia dan memberikan input kepada Pelaksana proyek dan juga Komisi Eropa.
4. Memberikan informasi terkini mengenai proses-proses pembuatan keputusan di Komisi Eropa, terutama di sektor kehutanan, yang berdampak langsung maupun tidak langsung kepada Indonesia dan masyarakat madani Indonesia.

### Bagaimana Bergabung?

Semua orang yang tertarik untuk mengetahui kebijakan bantuan ME di sektor kehutanan dan praktek pelaksanaannya dapat bergabung pada EC Forest Platform. Inisiatif ini merupakan jaringan individu dan organisasi yang bersifat tidak mengikat. Inisiatif ini tidak ditujukan untuk mencari pendanaan dari Uni Eropa.

Kirimkan email anda ke [iola@fern.org](mailto:iola@fern.org), disertai data mengenai organisasi anda dan minat atau kepentingan anda

Di Indonesia, anda bisa mengirim email kepada [aziz@telapak.org](mailto:aziz@telapak.org) untuk menyampaikan pandangan-pandangan anda dalam isu hutan di Indonesia, atau jika anda mempunyai informasi mengenai pelaksanaan proyek di sektor kehutanan yang didanai Komisi Eropa di daerah anda.



20 Avenue Des Celtes  
1040 Brussels, Belgium  
Tel. +32-2-7333653  
Fax. +32-2-7368054  
[www.fern.org](http://www.fern.org)

Jl. Palem Putri III No. 1-3  
Taman Yasmin Sektor 5,  
Bogor 16112, Indonesia  
Tel. +62-251-7159902  
Fax. +62-251-508375  
[www.telapak.org](http://www.telapak.org)